



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI IX DPR RI**

(Bidang : Kesehatan, Ketenagakerjaan dan Kependudukan)

Tahun Sidang	: 2023-2024
Masa Persidangan	: I
Rapat Ke	: 28 (dua puluh delapan)
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari/tanggal	: Selasa, 26 September 2023
Waktu	: Pukul 16.41 WIB – Selesai
Tempat	: Ruang Rapat Komisi IX DPR RI Gedung Nusantara I Lt.1 Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Pusat
Acara	: <ol style="list-style-type: none">1. Penjelasan terkait Peta Jalan Jaminan Sosial Tahun 2023-2024 berdasar Perpres Nomor 36 Tahun 2023;2. Hasil evaluasi atas capaian dan target kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Tahun 2022 serta inovasi ke depan;3. Penjelasan arah kebijakan investasi dana jaminan sosial nasional; dan4. Penyelesaian permasalahan data kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan yang dilaporkan oleh perusahaan yang tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya serta permasalahan dan kendala lainnya.
Ketua Rapat	: Dr. Hj. Kurniasih Mufidayati, M.Si/Wakil Ketua Komisi IX DPR RI
Sekretaris Rapat	: Ida Nuryati, S.Sos., M.A./Kepala Bagian Sekretariat Komisi IX DPR RI
Hadir	: <ul style="list-style-type: none">- Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial Dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan RI: Dra. Indah Anggoro Putri, M.Bus;- Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN): <u>Drg.</u> Agus Suprpto, M.Kes;- Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan: Muhammad Zuhri Bahri;- Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan: Anggoro Eko Cahyo. <p>B. 30 dari jumlah 49 Anggota Komisi IX DPR RI.</p>

I. PENDAHULUAN

Rapat Dengar Pendapat Komisi IX DPR RI dengan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial Dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan RI, Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan, Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, dibuka pukul 16.41 WIB., sesuai dengan Ketentuan Pasal 281 ayat (1) Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib, rapat telah memenuhi kuorum dan dinyatakan terbuka untuk umum.

II. KESIMPULAN

1. Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Ketenagakerjaan RI, Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), dan Direksi BPJS Ketenagakerjaan meningkatkan koordinasi dan memastikan Peta Jalan Jaminan Sosial Tahun 2023-2024 terlaksana secara sistematis, terarah, terukur dan berkelanjutan serta menyampaikan hasil kinerja kepada Komisi IX DPR RI setiap 3 (tiga) bulan.
2. Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Ketenagakerjaan RI untuk;
 - a. berkoordinasi dengan kementerian terkait untuk penyelesaian regulasi tentang PBI Jamsosnaker;
 - b. memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi peserta pemagangan luar negeri;
 - c. memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) *undocumented*,
 - d. meningkatkan pengawasan terhadap kepatuhan perusahaan atas hak dan kewajiban pekerja terhadap jaminan sosial ketenagakerjaan.
3. Komisi IX DPR RI mendesak Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) untuk melaksanakan Peta Jalan Jaminan Sosial Tahun 2023-2024 berdasarkan Perpres Nomor 36 Tahun 2023.
4. Komisi IX DPR RI meminta Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan untuk melakukan pengawasan secara aktif atas pelaksanaan Peta Jalan Jaminan Sosial Tahun 2023-2024 yang dilaksanakan oleh Direksi BPJS Ketenagakerjaan, dan menyampaikan hasil pengawasannya kepada Komisi IX DPR RI setiap 3 (tiga) bulan.
5. Komisi IX DPR RI akan mengagendakan Rapat Dengar Pendapat dengan Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) terkait Implementasi Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2023 tentang Peta Jalan Jaminan Sosial 2023-2024.
6. Komisi IX DPR RI meminta jawaban tertulis atas pertanyaan yang disampaikan oleh Anggota Komisi IX DPR RI pada RDP hari ini paling lambat tanggal 2 Oktober 2023.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 22.05 WIB.

Jakarta, 26 September 2023

KETUA RAPAT/
WAKIL KETUA KOMISI IX DPR RI,



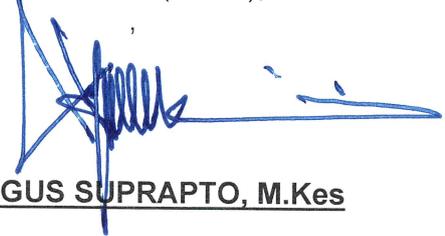
DR. HJ. KURNIASIH MUFIDAYATI, M.SI

DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN
HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN JAMINAN
SOSIAL TENAGA KERJA KEMENTERIAN
KETENAGAKERJAAN RI,



Dra. INDAH ANGGORO PUTRI, M.Bus

KETUA DEWAN JAMINAN SOSIAL
NASIONAL (DJSN),



Drg. AGUS SUPRAPTO, M.Kes

DEWAN PENGAWAS BPJS
KETENAGAKERJAAN,



MUHAMMAD ZUHRI BAHRI

DIREKTUR UTAMA BPJS
KETENAGAKERJAAN



ANGGORO EKO CAHYO